

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN
KEMAS RINDO KECAMATAN KERTAPATI PALEMBANG
(STUDI TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA)**

Oleh

DESITA RAHAYU

Staf Pengajar Kopertis Wilayah II DPK Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA
Bengkulu

ABSTRACT

Poverty does not just belong to the urban community that the economy condition is structurally more advanced than rural area. Poverty can be prevalent everywhere, from the central government to rural area or villages. Social and cultural dimensions of poverty are very complex in nature. This problem is related to the social attitudes. To determine whether the vendors including the poor, it has conducted research on a group of street vendors in Kelurahan Kemas Rindo District of Kertapati Palembang. Descriptive method was chosen because the researcher wanted to get a description of the phenomena that occur on the object of research. The poverty of street vendors in Kelurahan Kemas Rindo District of Kertapati Palembang is including into chronic poverty, which likely will also happen to their next generation. The policy to reduce the burden on poor people's consumption expenditure made by a variety of subsidy programs that assist the poor in accessing their basic needs, such as sufficient food, education and community productivity, and also health. The citizen productivity increasing can be done through the development and empowerment of people, especially micro, small and medium which include funding and guidance program which is related to the citizen's potentition. By increasing the productivity of society and through an approach that helps communities in accessing basic needs (food, health and education), it's hoped the poverty in Kemas Rindo area can be solved.

Keywords: poverty, productivity

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu utama bagi hampir sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Indonesia – Negara yang kaya akan bahan tambang, kondisi alam yang subur serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang melimpah. Namun pada kenyataannya sangat banyak penduduk yang kurang atau bahkan tidak menikmati keuntungan hidup di bumi yang kaya Sumber Daya Alam (SDA) ini. Berikut data penduduk miskin menurut daerah (lihat tabel 1):

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2006 berfluktuasi dari tahun ke tahun (Tabel 1). Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun

1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.

Sementara itu, data penduduk miskin berdasarkan provinsi dapat dilihat pada lampiran tabel 2. Berdasarkan tabel 2, maka diketahui bahwa jumlah penduduk miskin yang ada di provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan walau tidak signifikan yaitu pada tahun 2002 berjumlah 1.600.600 jiwa, menurun pada tahun 2003 menjadi 1.397.100 jiwa dan pada tahun 2004 juga mengalami sedikit penurunan yaitu 1.379.300 jiwa. Walaupun terjadi penurunan masyarakat miskin di Sumatera Selatan namun, kenyataan yang terjadi justru masih banyak mereka yang hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Kemiskinan tidak saja milik masyarakat perkotaan yang secara struktural perekonomiannya lebih maju dibanding daerah. Bukan pula hanya melanda daerah-daerah penghasil devisa negara. Baik dari aspek kekayaan alam, laut maupun udara. Secara antropologis kemiskinan dapat mewabah ke mana-mana, mulai pusat pemerintah sampai ke pelosok desa. Bagaimanapun, persoalan kemiskinan di negara kita sangat kompleks. Kemiskinan tidak hanya terkait dengan persoalan sosial ekonomi semata, tetapi juga sosial budaya. Ia bahkan juga berdimensi politik. Kemiskinan bisa menjadi komoditas politik potensial. Kelompok oposisi bisa menyerang pemerintah berkuasa jika mereka menemukan data perihal bertambahnya angka kemiskinan. Sebaliknya, rezim bisa juga menggunakan statistik kemiskinan (sekali pun statistik yang dipakai dinilai keliru) untuk mendongkrak popularitas di tengah pelbagai sorotan tajam atas kinerja Pemerintah.

Dimensi sosial budaya kemiskinan sangat kompleks sifatnya. Ini menyangkut perilaku masyarakat (*social attitudes*) terhadap problem kemiskinan. Untuk mengetahui apakah pedagang kaki lima termasuk kelompok penduduk miskin, maka telah dilakukan penelitian terhadap sekelompok orang pedagang kaki lima di Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang.

Dalam ruang lingkup kebijakan publik terdapat istilah isu, istilah ini berbeda maknanya dengan definisi isu dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa definisi isu menurut pendapat ahli :

“Isu kebijakan dengan begitu lazimnya merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu (Dunn, 1990).”

“Pada sisi lain, isu bukan hanya mengandung makna adanya masalah atau ancaman, tetapi juga peluang-peluang bagi tindakan positif tertentu dan kecenderungan-kecenderungan yang dipersepsikan sebagai memiliki nilai potensial yang signifikan (Hogwood dan Gunn, 1986).”

“... isu bisa jadi merupakan kebijakan-kebijakan alternative (*alternative policies*), atau suatu proses yang dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan baru, atau kesadaran suatu kelompok mengenai kebijakan-kebijakan tertentu yang dianggap bermanfaat bagi mereka (Alford dan Friendland, 1990).”

Jadi, berdasarkan beberapa pendapat di atas isu dapat diartikan sebagai topik yang muncul akibat proses perdebatan dalam memecahkan maupun menilai masalah tertentu dalam ranah kebijakan publik. Isu merupakan cikal-bakal terbentuknya kebijakan publik. Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman mengenai kebijakan. Kebijakan menurut Winarno (2007) :

“Digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang actor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu”.

Sementara menurut Dye (1987), “*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*”. Jadi, kebijakan merujuk kepada keputusan pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu.

Karena pembuatan kebijakan publik diawali dengan adanya isu yang mencuat dan diagendakan, maka perlu diketahui criteria isu yang dapat menjadi agenda kebijakan. Berikut ini beberapa kriteria tersebut menurut Wahab (1997):

1. Isu tersebut telah mencapai suatu titik kritis tertentu; sehingga ia praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja
2. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (*impact*) yang bersifat dramatic.
3. Isu tersebut menyangku emosi tertentu dilihat dari udut kepentingan orang banyak
4. Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.
5. Isu tersebut mepermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat.
6. Isu tersebut menyangkut suatu persoalan yang *fashionable*, di mana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya.

Berdasarkan kriteria di atas, maka dapat diketahui bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia memenuhi kriteria untuk masuk dalam agenda kebijakan.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah masyarakat miskin di Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang. Penelitian ini membahas jenis kemiskinan yang ada di daerah ini dan kebijakan penanggulangannya. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran atau deskripsi fenomena yang terjadi pada obyek penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti berharap dapat mengetahui dan memahami serta mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai kondisi dan kebijakan yang diteliti.

Kata ‘miskin’ sendiri didefinisikan oleh Sharp (2000) “... *is concerned with the relationship between the minimum needs of the people and their ability to satisfy those needs.*” Artinya, bila seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minimumnya maka ia tergolong miskin. Sementara Hill (2002) mengatakan bahwa :

Bagi para akademisi, ahli statistik di BPS, dan pemerintahan, “kemiskinan” didefinisikan dan dianalisis sebagai orang yang berada di bawah garis kemiskinan yang definisinya bervariasi.

Lauer (1992) berpendapat, “*The poor get less of everything we consider important and necessary for a decent life (less money, food, clothing, and shelter)*”.

Jadi, banyak sekali definisi kemiskinan menurut pendapat ahli. Sementara itu, bervariasinya ukuran kemiskinan maka perlu pula diketahui ciri masyarakat miskin secara lebih jelas. Menurut Saefuddin, dkk (2003) ciri masyarakat miskin :

- 1) secara politik : tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.
- 2) Secara social : tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada
- 3) Secara ekonomi : rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, ketrampilan yang berdampak pada penghasilan
- 4) Secara budaya dan tata nilai : terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas SDM seperti etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme
- 5) Secara lingkungan hidup, rendahnya pemilikan asset fisik termasuk asset lingkungan hidup, seperti air bersih, dan penerangan.

Ciri-ciri masyarakat miskin tersebut mengindikasikan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan yang terdiri dari berbagai sumber dimulai dari sumber ekonomi sampai dengan sumber lingkungan hidup.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jika kita merunut sistem ekonomi yang dibangun Negara Indoensia, mulai jaman orde lama dikenal ekonomi terpimpin. Masa orde baru memimpin dengan ekonomi Pancasila. Kedua sistim ekonomi itu pun luluh lantah, gelombang reformasi melahirkan ekonomi pasar bebas yang lebih mengarah pada kapitalistik. Sistem ekonomi yang dibangun negara berdampak terhadap tingkat kesejahteraan rakyatnya. Jika negara memiliki komitmen kuat menyejahterakan masyarakat, tentunya simpul-simpul ekonomi mulai dari pusat sampai daerah tidak terputus. Pemerintah perlu membuat formula baru agar angka ketergantungan antara pusat dan daerah tidak terlalu besar. Soalnya hiruk pikuk ekonomi berlari-lari di kota-kota besar saja. Sedangkan kota-kota kecil atau daerah pinggiran terjerembab pada kemiskinan kronis.

Begitu pun dengan kemiskinan yang berlangsung secara turun - temurun. Masyarakat yang dilahirkan sebagai petani, sebagai contoh. Melahirkan anak-anak petani, baik sebagai penggarap sawah atau pemilik sawah itu sendiri. Begitu pun masyarakat pedagang, hanya melahirkan anak-anaknya seorang pedagang. Ada beberapa penyebab terjadinya kemiskinan warisan berdasarkan <http://public.kompasiana.com/feed/>: "...diantaranya keterbatasan pendidikan untuk anak-anaknya. Bisa juga pendidikan memang mewariskan kemiskinan struktural. Karena dari pendidikan tidak menghasilkan kualitas sumber daya manusia (SDM) mumpuni." Begitu pula dengan para pedagang kaki lima di Kertapati, mereka merupakan produk SDM yang rendah mutunya karena rata-rata tidak atau hanya tamat Sekolah Dasar (SD).

Jika kita merunut sistem ekonomi yang dibangun Negara Indonesia, mulai zaman orde lama dikenal ekonomi terpimpin. Masa orde baru memimpin dengan ekonomi Pancasila. Kedua sistem ekonomi itu pun luluh lantah, gelombang reformasi melahirkan ekonomi pasar bebas yang lebih mengarah pada kapitalistik. Sistim ekonomi yang dibangun negara berdampak terhadap tingkat kesejahteraan rakyatnya. Jika negara memiliki komitmen kuat menyejahterakan masyarakat, tentunya simpul-simpul ekonomi mulai dari pusat sampai daerah tidak terputus.

Pemerintah perlu membuat formula baru agar angka ketergantungan antara pusat dan daerah tidak terlalu besar. Soalnya hiruk pikuk ekonomi berlari-lari di kota-kota besar saja. Sedangkan kota-kota kecil atau daerah pinggiran terjerembab pada

kemiskinan kronis. Begitu pun dengan kemiskinan yang berlangsung secara turun-temurun. Masyarakat yang dilahirkan sebagai petani, sebagai contoh. Melahirkan anak-anak petani, baik sebagai penggarap sawah atau pemilik sawah itu sendiri. Begitu pun masyarakat pedagang, hanya melahirkan anak-anaknya seorang pedagang. Ada beberapa penyebab terjadinya kemiskinan warisan berdasarkan <http://public.kompasiana.com/feed/>: “...diantaranya keterbatasan pendidikan untuk anak-anaknya. Bisa juga pendidikan memang mewariskan kemiskinan struktural. Karena dari pendidikan tidak menghasilkan kualitas sumber daya manusia (SDM) mumpuni.”

Begitu pula dengan para pedagang kaki lima di Kertapati, mereka merupakan produk SDM yang rendah mutunya karena rata-rata tidak atau hanya tamat SD. Ketidakmampuan melanjutkan pendidikan merupakan indikasi ketidakmampuan memperoleh sumber pendidikan yang layak.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pada aspek ekonomi sebagian besar pedagang memulai usaha dengan keterbatasan modal cenderung sangat minim. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan “... dahulu tahun 2004, dik. Hanya dengan modal lima puluh ribu rupiah.” Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa rata-rata para pedagang termotivasi berjualan karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pokok ditambah lagi tidak adanya larangan secara frontal terhadap pedagang di daerah kertapati seperti yang terjadi di pasar 16 Palembang, walaupun dengan keterbatasan modal sehingga mereka tumbuh menjadi pedagang “liar”.

Selama rentang waktu 5 (lima tahun terakhir saja) belum pernah ada pedagang kaki lima di daerah Kemas Rindo yang mendapat teguran ataupun penertiban dari Polisi Pamong praja menjadikan para pedagang ini cenderung merasa aman dalam berjualan sehingga cenderung tidak ada permasalahan yang rumit yang harus dipecahkan dan membutuhkan penanganan khusus.

Kebutuhan sandang, pangan dan papan merupakan prioritas utama. Saat masyarakat membutuhkan ketiga pokok itu, tersedia dengan harga terjangkau atau tidak ini menjadi masalah besar. Soalnya, daya beli berakitan erat dengan jumlah pendapatan perkapita keluarga. Pada jaman orde baru, Harmoko menyebutkan, standar perkapita keluarga di Indonesia sekitar Rp 200.000 perbulan.

Pasca krisis moneter dan sekarang disambung krisis global, berapa jumlah pendapatan per kapitanya? Sulit bagi pedagang kaki lima untuk memenuhi standar hidup layak dari Bank Dunia yaitu US \$ 1 per hari atau sama dengan Rp 12.000 per hari. Jadi, jika ada 4 anggota keluarga dalam satu rumah tangga pedagang ini, maka dibutuhkan Rp 48.000/ hari. Sementara penghasilan mereka rata-rata di bawah Rp 30.000/ hari.

Saefuddin dkk (2003:6) mengatakan bahwa penduduk miskin di Indonesia dibedakan menjadi :

- a) kemiskinan kronis (*chronic poverty*) atau kemiskinan structural; yang terjadi terus-menerus
- b) kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi kondisi krisis.

Berdasarkan pendapat Saefuddin tersebut, maka dapat diketahui bahwa kemiskinan yang dialami oleh para pedagang kaki lima di Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati ini merupakan jenis kemiskinan kronis, yang cenderung akan mereka wariskan juga kepada anak cucu mereka. Agar tidak terjadi pewarisan kemiskinan maka problem ini perlu segera ditangani. Kemiskinan sendiri menjadi perhatian dunia sejak era 1970-an, ketika disadari bahwa pembangunan yang berideologikan modernisasi dengan kapitalisme yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sebagai motornya ternyata tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terjadi karena pertumbuhan tidak menetes ke bawah dengan baik.

Teori *trickle down effect* yang menyatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan *multiplier effect* yang besar dan akan menyebar ke semua lapisan masyarakat dengan baik, ternyata tidak dapat berjalan. Di Indonesia, berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan secara sektoral. Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang didasari oleh Keppres RI No. 124 tahun 2001, pada 7 Desember 2001 merupakan bentuk pendekatan baru dalam penanggulangan kemiskinan dari jalur struktural.

Komite ini menetapkan strategi pemberdayaan masyarakat melalui 2 cara, yaitu :

- a. mengurangi beban pengeluaran konsumsi ke kelompok miskin
- b. meningkatkan produktivitas masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya.

Upaya untuk mengurangi beban pengeluaran konsumsi masyarakat miskin dilakukan dengan berbagai program subsidi yang membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok, yang meliputi pangan, pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan produktivitas masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha masyarakat terutama usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi penajaman program, pendanaan dan pendampingan.

Upaya pengentasan kelompok pedagang kaki lima dari kemiskinan, dapat dilakukan dengan peningkatan produktivitas masyarakat maupun melalui pendekatan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok (pangan, kesehatan dan pendidikan).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima di Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Palembang merupakan kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan yang mereka alami merupakan jenis kemiskinan struktural karena merupakan warisan dari orang tuanya terdahulu. Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk mengakses sumber daya yang tersedia. Sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia yang rendah menyebabkan produktivitas yang dihasilkan rendah juga. Produktivitas yang rendah menyebabkan penghasilan yang rendah, dan ini menghasilkan kemiskinan kembali.

Lingkaran kemiskinan terus terjadi karena dengan penghasilan yang rendah sebagian masyarakat tidak mampu mengakses pendidikan yang baik, kesehatan yang memadai, dan nutrisi yang baik. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan kualitas SDM yang aspek intelektual, fisik, dan produktivitasnya rendah. Karena rendahnya kualitas SDM, maka kelompok ini tersisih dari persaingan ekonomi. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang cenderung tepat dalam memberantas kemiskinan ini adalah kebijakan pemberdayaan masyarakat, sehingga potensi yang ada di masyarakat dimanfaatkan dengan bantuan pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dye, Thomas R. 1987, *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.
- Hill, Hal. 2002, *Ekonomi Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hogwood, Brian W., and Lewis A. Gunn.1986, *Policy Analysis for The Real World*, Oxford University Press.
- Lauer, Robert H. 1992, *Social Problems and The Quality of Life*, Wm.C. Brown Publishers, USA.
- Saefuddin, dkk. 2003, *Menuju Masyarakat Mandiri Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sharp, Ansel Miree. 2000, *Economics Of Social Issues*, The MacGraw-Hill Companies, Inc. USA.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2007, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Sumber Lain :

tkpkri.org/data-kemiskinan